

RENCANA STRATEGIS |2020-2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH



KATA PENGANTAR

Puji syukur, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah dan rahmat-Nya jualah kami dapat menyusun dan menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh tahun 2020-2024 ini akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh yang hendak dicapai dalam tahun 2020-2024. Selain itu, Renstra ini diharapkan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan.

Saran dan kritik yang membangun kami terima dengan lapang dada sehingga visi dan misi membangun kebudayaan yang berbhineka tunggal ika di Indonesia umumnya dan Aceh khususnya dapat terwujud sesuai dengan harapan semua pihak. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.

Banda Aceh, Juni 2022
Kepala Balai Pelestarian
Nilai Budaya Provinsi Aceh



Drs. Nurmatias
NIP 196912261997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kondisi Umum	3
1.3. Potensi dan Permasalahan.....	4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BPNB PROVINSI ACEH	9
2.1. Visi dan Misi.....	9
2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan.....	11
2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	14
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	14
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh.....	15
3.3. Kerangka Regulasi	17
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
4.1. Target Kinerja.....	24
4.2. Kerangka Pendanaan	25
BAB V PENUTUP.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia. Kebudayaan Indonesia berkaitan dengan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya masyarakat yang tinggal mendiami wilayah Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang terbentuk dari ratusan budaya daerah yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Di sini ditemukan ratusan adat istiadat, kesenian, dan bahasa sukubangsa yang berbeda-beda, yang merupakan potensi untuk dikembangkan dalam proses pembangunan ke depan terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di seluruh pelosok tanah air.

Mengingat pentingnya peran kebudayaan untuk pembangunan, maka diperlukan sebuah lembaga strategis yang menangani berbagai permasalahan kebudayaan di daerah, baik budaya dalam bentuk benda (*tangible*) maupun budaya dalam bentuk nilai atau non benda (*intangible*). Keberadaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh merupakan salah satu lembaga teknis yang kedudukannya sangat strategis dalam mengkoordinasikan penanganan masalah kebudayaan yang terjadi di daerah dan sebagai pemecahan masalah yang dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat (Kementerian). Selain itu keberadaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh juga menjadi pelopor dari pelestari budaya di daerah

disebabkan kedudukannya yang berdasarkan *culture area*, sehingga mampu mengkoordinasikan kepada Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, maupun komunitas-komunitas budaya (seni, film dan pecinta sejarah) di Aceh dan Sumatera Utara.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya nama kelembagaan UPT ini secara resmi muncul setelah keluarnya Keppres No. 44 tahun 1974 tentang status kelembagaan UPT.

Sejalan dengan perubahan yang terjadi pada lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh yang statusnya pada awal pembentukannya (sebelum tsunami) berada di bawah Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata secara teknis berada dalam lingkup kerja Direktorat Sejarah, Direktorat Tradisi dan Kepercayaan. UPT ini berkedudukan sebagai wadah operasional di bidang teknis serta penyelenggara kegiatan pengkajian, pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hasil kajian bidang kesejarahan dan kenilaitradisional daerah.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya melaksanakan tugas-tugas di bidang kebudayaan yaitu:

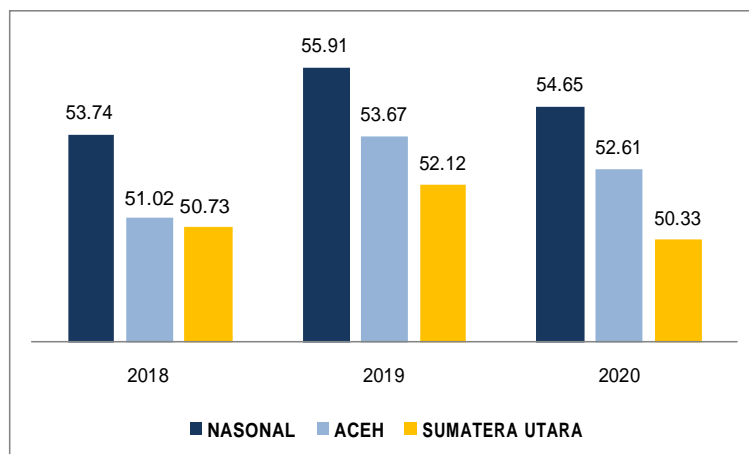
“BPNB Aceh bertugas melaksanakan pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya”.

Oleh karena itu, dan menjalankan tugas dan fungsinya, BPNB Provinsi Aceh telah menyusun rencana strategi 2020-2024 sebagai

pedoman dan arah pencapaian visi, misi dan tujuan sehingga segala program yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

1.2. Kondisi Umum

BPNB Provinsi Aceh telah menjalankan program-program dalam memajukan tata kelola kebudayaan di Aceh dan Sumatera Utara. Namun dalam prosesnya dibutuhkan usaha yang lebih besar sebagaimana terukur dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang masih dibawah rata-rata nasional yang tercemin dalam tabel berikut:



Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan
Sumber : Ditjen Kebudayaan, 2021

Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional yang masih dibawah angka nasional menjadi perhatian untuk dapat ditingkatkan melalui program-program pelestarian budaya yang tepat, sehingga memiliki dampak besar dalam penigkatan Indek Pembangunan Kebudayaan kedepannya.

Selain itu, sampai dengan 2020 perkembangan penetapan warisan budaya takbenda di provinsi Aceh dan Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

No	Tahun	2013-2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Aceh	20	5	7	4	3	39
2	Sumatera Utara	15	5	8	1	2	31
Total		35	10	15	5	5	70

Perkembangan penetapan warisan budaya takbenda

Sumber: Statistik Kebudayaan 2021

Per tahun 2020 perkembangan jumlah penerima bantuan pemerintah fasilitasi komunitas budaya di provinsi Aceh dan Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

No	Tahun	2012-2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Aceh	69	5	12	10	4	100
2	Sumatera Utara	70	5	99	9	4	97
Total		139	10	111	19	8	197

Perkembangan jumlah penerima bantuan pemerintah fasilitasi komunitas budaya

Sumber: Statistik Kebudayaan 2021

1.3. Potensi dan Permasalahan

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menggariskan empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setiap langkah melayani kebutuhan yang spesifik. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bertujuan memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan, sementara pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam ekosistem kebudayaan.

1. Permasalahan

Tantangan yang dihadapi oleh BPNB Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan terfokus pada tiga aspek pemajuan. Pertama, perlindungan kebudayaan yang meliputi upaya-upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai warisan bagi sukubangsa dan generasi penerus. Tindakan Pelindungan dilakukan dengan cara Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan, dan publikasi. Kerja sama dengan daerah dalam Pendataan dan pengelolaan informasi yang baik adalah syarat mutlak bagi upaya pemajuan kebudayaan yang tepat guna. Demikian juga dengan publikasi terkait budaya setempat yang perlu melibatkan stakeholder maupun komunitas agar informasi mengenai budaya dapat tersebar luas ke masyarakat.

Kedua, Pengembangan yang meliputi upaya-upaya memberdayakan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah terkendalanya penyelenggaraan pameran dan festival yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah khususnya dalam sharing anggaran.

Ketiga, Pemanfaatan yang meliputi upaya-upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Untuk itu dibutuhkan ide-ide yang kreatif dalam mengemas budaya menjadi hal yang menarik bagi masyarakat yang dirasa masih sulit untuk dilakukan, dan juga bagaimana menghadirkan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan budayawan maupun seniman.

2. Analisis Masalah

Analisis dilakukan menggunakan metode SWOT. Serangkaian factor internal (kekuatan, kelemahan), dan faktor eksternal (peluang, ancaman) disusun ke dalam matriks seperti di bawah ini sesuai dengan urutan skor yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal, sehingga diperoleh 4 kelompok strategi, yaitu:

- S - O strategy yaitu merupakan strategi yang mengandalkan kekuatan yang dimiliki BPNB Bali untuk meraih peluang yang ada.
- S - T strategi yaitu merupakan strategi memobilisasi kekuatan yang dimiliki organisasi (BPNB) untuk mengatasi hambatan atau ancaman.
- W - O strategy yaitu merupakan strategi untuk meraih peluang dengan cara mengatasi kelemahan BPNB, misalnya dengan meningkatkan SDM dan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengatasi kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan, sehingga dapat meraih peluang.
- W - T strategy yaitu merupakan strategi meminimalkan kerusakan (damage) sehingga strategi-strategi tersebut untuk masing-masing kelompok strategi.

SW/OT		Kekuatan	Kelemahan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan pimpinan 2. Adanya motivasi bagi tenaga fungsional peneliti meningkatkan kemampuan 3. Adanya program kegiatan bimbingan teknis 4. Pembagian tugas kegiatan yang merata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kemampuan tenaga peneliti dan pelestarian menerapkan tehnik dan metodologi penelitian/kajian 2. Kurangnya hasil & jenis pelestarian yang berkualitas 3. Terbatasnya petugas peningkatan hasil penelitian dan pelestarian 4. Terbatasnya petugas untuk pembinaan & pengembangan kebudayaan
		Strategy S – O	Strategy W – O
Peluang <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jabatan fungsional peneliti/pamong budaya sesuai bidang kepakaran 2. Banyaknya nilai-nilai budaya suku bangsa, kesejarahan & kepercayaan terhadap Tuhan YME yang belum diteliti 3. Adanya dukungan dari instansi terkait 4. Adanya pangsa pasar bercirikan pariwisata budaya 5. Melengkapi materi pendidikan untuk muatan lokal dari aspek nilai budaya, sejarah & kepercayaan terhadap Tuhan YME 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan dukungan pimpinan 2. Dukungan sepenuhnya terhadap potensi yang dimiliki tenaga peneliti 3. Prioritaskan tenaga peneliti dan pelestarian yang berprestasi dan memberi pembinaan bagi yang belum berprestasi 4. Tingkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang multidisipliner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan tenaga fungsional peneliti menerapkan tehnik & metodologi 2. Meningkatkan hasil & jenis penelitian yang berkualitas 3. Meningkatkan kemampuan petugas pengkemas hasil penelitian dan pelestarian 4. Meningkatkan sarana & prasarana publikasi hasil penelitian dan pelestarian 5. Meningkatkan kemampuan petugas pemmbinaan & pengembangan kebudayaan 	
		Strategy S – T	Strategy W – T
Ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesempatan untuk diklat teknis fungsional peneliti/pamong budaya 2. Kurangnya mass media cetak & elektronik untuk mempublikasikan hasil penelitian nilai budaya suku bangsa, sejarah & kepercayaan terhadap Tuhan YME 3. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hasil penelitian & pembinaan nilai budaya suku bangsa, sejarah dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 4. Rendahnya kemampuan pemerintah mendanai program kegiatan penelitian & pembinaan nilai budaya suku bangsa, sejarah dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah usul untuk diklat teknis pelestarian dan peneliti 2. Meningkatkan minat mass media cetak & elektronik mempublikasikan hasil penelitian & pembinaan nilai budaya suku bangsa, sejarah & kepercayaan terhadap Tuhan YME 3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hasil penelitian & pelestarian dan pembinaan nilai budaya suku bangsa, sejarah & kepercayaan terhadap Tuhan YME 4. Meningkatkan kemampuan memanfaatkan dana yang ada dalam program kegiatan penelitian dan pelestarian nilai budaya suku bangsa, sejarah & kepercayaan Tuhan YME 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan potensitenaga yang ada 2. Menciptakan kerjasama yang baik dengan mass media cetak & elektronik 3. Meningkatkan jumlah cetakan hasil penelitian & frekuensi pembinaan 4. Meningkatkan efisiensi & pengawasan penggunaan dana yang dialokasikan untuk program kegiatan penelitian nilai budaya suku bangsa, sejarah & kepercayaan terhadap Tuhan YME 	

3. Potensi

Dari analisis potensi dan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam penentuan rencana strategis BPNB Aceh 2020-2024 adalah:

- a. Terdapatnya program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Adanya jejaring kerja yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Terjalannya kerja sama yang baik dengan mitra kerja;
- d. Tersedianya sarana teknologi informasi yang memadai sebagai alat promosi komunikasi, dan publikasi; dan
- e. Terbentuknya sistem manajemen kerja dalam rangka meningkatkan kualitas.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BPNB PROVINSI ACEH

2.1. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melestarikan kebudayaan dan kesejarahan Aceh dan Sumatera Utara dengan menempatkan kebudayaan sebagai “panglima” dalam semua lini pembangunan. Untuk itu dalam rangka menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi sebuah visi dan misi yang ingin diwujudkan.

Adapun visi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dirumuskan sebagai berikut:

Visi Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh

“Menjadikan pusat informasi dan pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan kesejarahan Utama di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara”

Untuk mencapai visi tersebut Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh menetapkan misi yang akan dilaksanakan meliputi :

Misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh

- 1. Melaksanakan kajian dan pengembangan dalam rangka melestarikan nilai budaya.*
 - 2. Meningkatkan pelestarian nilai budaya, seni dan film serta sejarah di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.*
 - 3. Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pelestarian budaya.*
-

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 175/O/2021 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya antara lain:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Balai;
2. Melaksanakan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
3. Melaksanakan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
4. Melaksanakan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
5. Melaksanakan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
6. Melaksanakan advokasi di bidang perlindungan aspek- aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
7. Melaksanakan kemitraan di bidang pelestarian aspek- aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan dengan unit kerja/instansi, lembaga, dan masyarakat;
8. Melaksanakan pemberian layanan teknis pelestarian tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
9. Melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
10. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai;
11. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelestarian tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
12. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai; dan
13. melaksanakan penyusunan laporan Balai.

2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional. Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi misinya tersebut. Tentunya formulasi tujuan dan strategi ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta searah dengan Renstra Kemendikbudristek dan direktorat jenderal kebudayaan.

Lebih lanjut perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Adapun tujuan jangka panjang lima tahunan pembangunan sejarah dan budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Perumusan tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh pada Tahun 2022-2024 dengan perumusan sebagai berikut:

No	Kode	Tujuan (Sesuai SP Kemendikbudristek)	Kode	Indikator Kinerja Tujuan (Sesuai IKP Kemendikbudristek)	Satuan	Target Keberhasilan Tujuan		
						Target 2022	Target 2023	Target 2024
1	SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	IKP 3.2.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan Seni	%	0,31%	0,5%	0,5%

2	SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	IKP 3.2.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%	55,76%	58,86%	61,62%
3	SP	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan inklusif	IKP 3.2.6	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,99%	2,01%	2,04%
4	SP	Terwujudnya tata kelola yang berkualitas	IKP 5.3.9	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh	Predikat	BB	A	A
5	SP	Terwujudnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	IKP 5.3.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sebagai upaya mencapai sasaran strategis dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya pada masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pemahaman dan apresiasi masyarakat tentang sejarah dan budayanya dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan zaman sehingga nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sejarah dapat tetap lestari dan terus berkembang, maka disusun sasaran dan kegiatan yang searah dengan tujuan. Sasaran-sasaran ini ditargetkan dapat dicapai di wilayah kerja Balai pelestarian Nilai Budaya Aceh yaitu Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara. Sasaran ini sifatnya akuntabel dan dapat diukur dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Sasaran (Sesuai SK Kemendikbudristek)	Kode	Indikator Kinerja Sasaran (Sesuai IKK Kemendikbudristek)	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Satuan	Target Keberhasilan Kinerja Sasaran			Sumber Data
						Target 2022	Target 2023	Target 2024	
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	IKK 3.2.1.3	Jumlah event kebudayaan daerah yang diselenggarakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Jumlah event/kegiatan kebudayaan daerah yang diselenggarakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh dalam 1 Tahun	Kegiatan	6	7	7	Susenas MSBP, Laporan Internal Kegiatan BPNB
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	IKK 3.2.2.2	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Jumlah unit Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh dalam 1 Tahun	Unit	197	197	193	Laporan Internal Kegiatan BPNB
SK	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	IKK 3.2.6.3	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Jumlah orang atau kelompok yang menerima fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh dalam 1 tahun	Orang/ kelompok masyarakat	28	43	45	Laporan Internal
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja	IKK 5.3.9.1	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Predikat Laporan hasil evaluasi SAKIP	Predikat	BB	A	A	Laporan hasil evaluasi SAKIP
SK	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	IKK 5.3.13.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L B dari Kementerian Keuangan	Kategori	92	93	94	SMART DJA, SAKTI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan kementerian/lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Renstra Kemendikbudristek harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdayasaing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3, 4, dan 7

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang kebudayaan, maka arah kebijakan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melalui pengarusutamaan kebudayaan dalam pendidikan
2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.
3. Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel dan berkualitas serta pelayanan publik yang prima.

Strategi BPNB Provinsi Aceh untuk mencapai kondisi pengarusutamaan kebudayaan dalam pendidikan sebagai berikut:

- a. memajukan budaya melalui wahana pendidikan di berbagai jenjang dan berbagai ranah

Strategi BPNB Provinsi Aceh untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- b. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
- c. mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;

- d. mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
- f. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
- g. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan;
- h. meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
- i. mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah; dan
- j. mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah.

Strategi BPNB Provinsi Aceh untuk Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel dan berkualitas serta pelayanan publik yang prima sebagai berikut:

- a. memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
- b. memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah
- c. penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundangundangan;

3.3. Kerangka Regulasi

Pembangunan Karakter dan JatiDiri Bangsa dalam Konstitusi. Posisi strategis pembangunan karakter dan Jati diri bangsa juga termanifestasi dalam konstitusi, seperti terumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 32 yang berbunyi: Pasal 32, ayat 1 dan 2:

Ayat 1: “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Ayat 2: “negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Dalam rangka pengejawantahan pembangunan karakter dan penguatan jati diri bangsa, maka langkah pertama ditempuh melalui pemahaman tentang kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan system nilai, gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban.

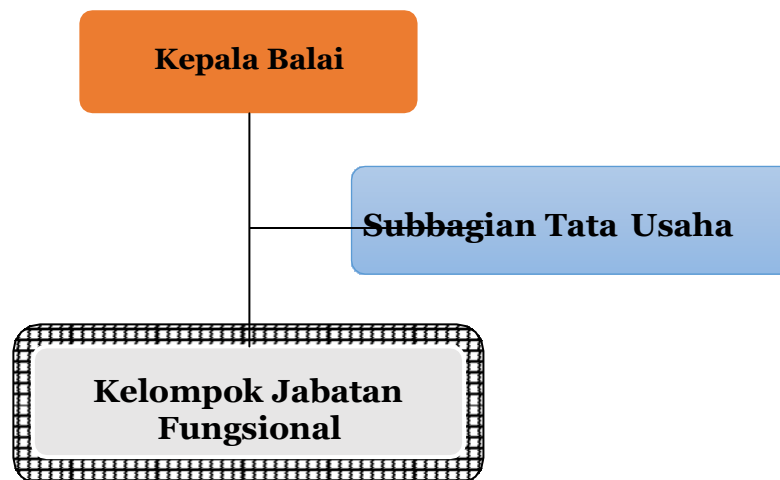
3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikbudristek sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur

organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

1. Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, Maka struktur organisasi BPNB Aceh adalah sebagai berikut:



Susunan tugas dan fungsi organisasi tersebut sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan

kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan dan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan BPNB Aceh.

- b. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan system merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan unit kerja. Untuk itu, sampai dengan 2024 Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh, berupaya mewujudkan birokrasi SMART ASN sesuai dengan roadmap sumber daya manusia secara nasional yaitu aparatur sipil Negara yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, teknologi informasi dan komunikasi, dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship.

Untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh aparatur sipil negara.

a. Kondisi Aparatur Sipil Negara BPNB Provinsi Aceh

No	Jabatan	Kelas	Jumlah
1	Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh	13	1
2	Pamong Budaya Madya	11	1
3	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1
4	Pamong Budaya Muda	9	4
5	Penerjemah Muda	9	-
6	Pamong Budaya Pertama	8	4
7	Penerjemah Pertama	8	-
8	Bendahara	7	1
9	Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan	7	2
10	Analisis Nilai Budaya	7	-
11	Teknisi Produksi	6	2
12	Pengelola Data Nilai Budaya	6	5
13	Verifikator Keuangan	6	1
14	Pengelola Barang Milik Negara	6	-
15	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6	1
16	Pengelola Dokumentasi	6	-
17	Pengadministrasian Barang Milik Negara	5	-
18	Pengadministrasian Keuangan	5	-
19	Pengadministrasian Persuratan	5	1
20	Pengadministrasian Perpustakaan	5	1
21	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	-
22	Pengadministrasian Kepegawaian	5	-
23	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	1
Total			26

b. Kondisi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri BPNB Provinsi Aceh

No	Jabatan	Jumlah
1	Satuan Pengamanan	6
2	Driver	1
3	Administrasi	6
Total		13

c. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2020-2024

Kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan BPNB Provinsi Aceh. Di samping itu, proyeksi kebutuhan sumber daya manusia juga mempertimbangkan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja. Berikut gambaran proyeksi kebutuhan sumber daya manusia BPNB Provinsi Aceh.

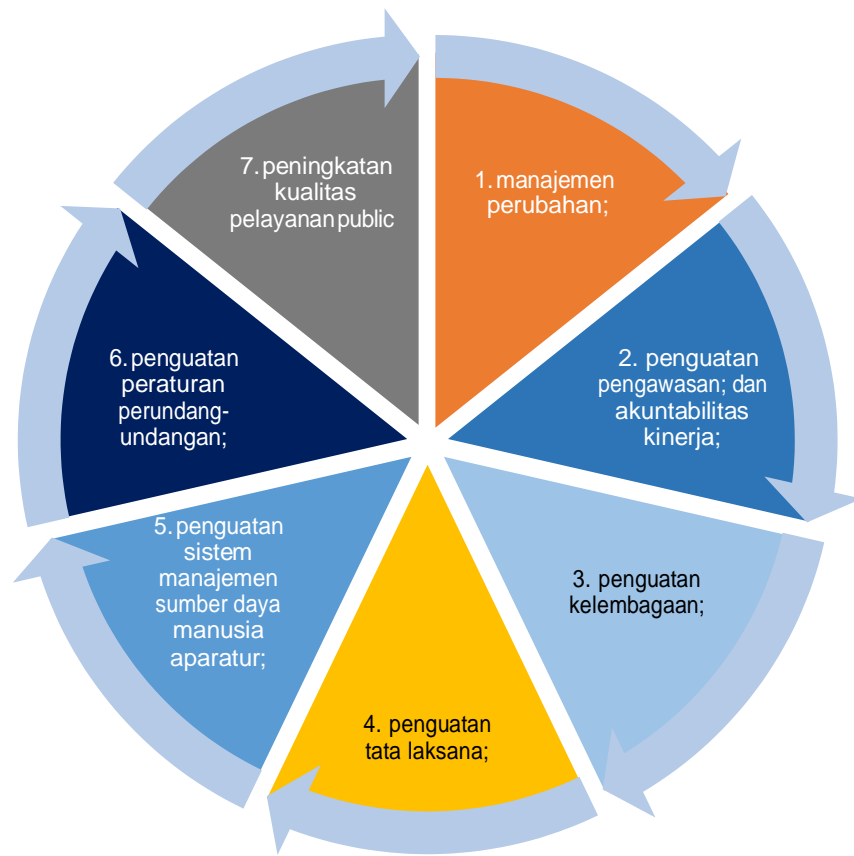
No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pamong Budaya Madya	11	1	9	-8
2	Pamong Budaya Muda	9	4	17	-13
3	Penerjemah Muda	9	-	2	-2
4	Pamong Budaya Pertama	8	4	23	-19
5	Penerjemah Pertama	8	-	2	-2
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	8	-	1	-1
7	Perencana Pertama	8	-	1	-1
8	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	-	1	-1
9	Analisis Pembiayaan dan Resiko Keuangan	8	-	1	-1
10	Penata Laksana Barang Mahir	8	-	1	-1
11	Analisis Kepegawaian Pertama	8	-	1	-1
12	Pranata Humas Pelaksana	8	-	1	-1
13	Analisis Nilai Budaya	7	-	6	-6
14	Penata Laksana Barang Terampil	7	-	1	-1
15	Pustakawan Pelaksana	7	-	1	-1
16	Penata Laksana Barang Terampil	7	-	1	-1
17	Analisis Kepegawaian Pelaksana	7	-	1	-1
18	Penata Laksana Barang Terampil	7	-	1	-1
19	Pengelola Data Nilai Budaya	6	5	8	-3
20	Pengelola Barang Milik	6	-	1	-1

	Negara				
21	Pengelola Dokumentasi	6	-	1	-1
22	Pengadministrasi Keuangan	5	-	2	-2
23	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	-	1	-1
24	Pengadministrasi Persuratan	5	1	2	-1
25	Pengadministrasi Perpustakaan	5	1	2	-1
26	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	-	1	-1
27	Pengadministrasi Kepegawaian	5	-	1	-1
Total					-74

d. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan BPNB Provinsi Aceh. Program Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024 mampu mendorong tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas, termasuk pula manajemen serta kinerja sumber daya manusia yang tinggi.

Selain itu, Kemendikbudristek juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi 8 (delapan) area perubahan, yakni:



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dengan indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Kode	Sasaran (Sesuai SK Kemendikbudristek)	Kode	Indikator Kinerja Sasaran (Sesuai IKK Kemendikbudristek)	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Satuan	Target Keberhasilan Kinerja Sasaran			Sumber Data
						Target 2022	Target 2023	Target 2024	
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	IKK 3.2.1.3	Jumlah event kebudayaan daerah yang diselenggarakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Jumlah event/kegiatan kebudayaan daerah yang diselenggarakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh dalam 1 Tahun	Kegiatan	6	7	7	Susenas MSBP, Laporan Internal Kegiatan BPNP

SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	IKK 3.2.2.2	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Jumlah unit Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh dalam 1 Tahun	Unit	197	197	193	Laporan Internal Kegiatan BPNP
SK	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	IKK 3.2.6.3	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Jumlah orang atau kelompok yang menerima fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh dalam 1 tahun	Orang/kelompok masyarakat	28	43	45	Laporan Internal
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja	IKK 5.3.9.1	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Predikat Laporan hasil evaluasi SAKIP	Predikat	BB	A	A	Laporan hasil evaluasi SAKIP
SK	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	IKK 5.3.13.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L B dari Kementerian Keuangan	Kategori	92	93	94	SMART DJA, SAKTI, SPASI KITA

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan kinerja diperlukan peningkatan pembiayaan dari anggaran rutin pada setiap tahun anggaran. Di samping itu perlu kiranya dukungan kerjasama dengan Dinas/instansiterkait di wilayahkerja BPNB Aceh.

Rencana pendanaan untuk mencapai Visi dan Misi BPNB Aceh sebagai berikut:

Kode	Sasaran (Sesuai SK Kemendikbud ristek)	Kode	Indikator Kinerja Sasaran (Sesuai IKK Kemendikbud ristek)	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Satuan	PAGU ANGGARAN (Rp. Milyar)			Sumber Pendanaan
						2022	2023	2024	
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	IKK 3.2.1.3	Jumlah event kebudayaan daerah yang diselenggarakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Jumlah event/kegiatan kebudayaan daerah yang diselenggarakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh dalam 1 Tahun	Kegiatan	17,36	18,63	19,56	APBN
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	IKK 3.2.2.2	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Jumlah unit Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh dalam 1 Tahun	Unit	0,68	0,75	0,83	APBN

SK	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	IKK 3.2.6.3	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Jumlah orang atau kelompok yang menerima fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh dalam 1 tahun	Orang/kelompok masyarakat	0,58	0,64	0,70	APBN
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja	IKK 5.3.9.1	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Predikat Laporan hasil evaluasi SAKIP	Predikat	1,05	1,05	1,05	APBN
SK	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	IKK 5.3.13.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Aceh	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L B dari Kementerian Keuangan	Kategori	5,31	5,77	5,95	APBN
						24,98	26,84	28,09	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh Tahun 2020–2024 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapandengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan kebudayaan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra BPNB Aceh telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Balai, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Renstra menjabarkan visi BPNB Aceh beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Kementerian. Berhasilnya implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan BPNB Aceh, serta dukungan instansi terkait dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan Kebudayaan dan pembangunan masa depan generasi bangsa. Bagi segenap unsur BPNB Aceh hanya tersedia satu jalan lurus untuk mencapai cita-cita luhur yang digariskan dalam Renstra ini, yaitu bekerja keras dan bersungguh-sungguh seraya berdoa kepada Allah SWT.